PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

								Pelaksana					1		Mutu I	Baku		
No.	Uraian Prosedur	Pemohon/ Masyarakat	Operator Penerima WA	Operator Pengangka t Data	Operator Cetak Berkas	Petugas Loket Pendaftaran	Kasi Identitas penduduk	Oprator	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Petugas Pemilah Berkas	Operator Pengirim PDF	Kasi	Petugas POS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Pemohon mengirim berkas melalui WA	mulai													Masyarakat mengajukan permohonan Layanan melalui Pelayanan Bunda Dewi (Buat Dokumen Adminduk dengan WA dan Internet) atau Pelayanan Online		Berkas Pengajuan	
	Operator Penerima WA menerima Permohonan untuk diteruskan ke Operator Pengangkat Data		-												2 Masyarakat yang melakukan perekaman, namun hasilnya belum dicetak (PRR/Print Ready Record)		File berkas Pengajuan	
	Data Pemohon diterima dan Diangkat oleh Operator Pengangkat Data			>												Berkas Pengajuan di Ceklis kelengkapan		
	Selanjutnya Berkas Permohonan di Cetak oleh Opr Cetak				•											5 hari	Berkas Pengajuan yang sudah di paraf	5
	Berkas yang telah di cetak di kirim ke Loket Pendaftaran Untuk dicatat dalam buku registrasi pendaftaran, diverifikasi dan dicatat nomor WA pemohon					->											File berkas yang sudah tercetak	
	Berkas diserahkan kepada Kasi untuk diverifikasi dan persetujuan untuk di proses						>										Berkas Pengajuan yang ingin diproses	5
	Pengentrian Data dan Pengajuan penandatanganan secara elektronik kepada Kepala Dinas							-										
8	Kepala dinas menendatangani dokumen secara Elektronik								\									

TAN	IGGA	MUS
~		2)
1		
1	BEGAWI JEJA	MAT

PEMERINTAH DAERAH KAKABUPATEN TANGGAMUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	BUPATI TANGGAMUS
	Nom
	DEWI HANDAJANI
Judul SOP	PELAYANAN BUNDA DEWI HARUM

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah	1.Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi;
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun2013;	2. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;	3. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang	
Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah	
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;	
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Replublik Indonesia	
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman StandarPelayanan;	
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018Tentang Persyaratan dan Tata Cara	
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
6 Permendagri No. 102 Th 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data	
Kependudukan	
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan	
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran	
Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
8 Permendagri No. 109 Th 2019 Tantang Formulir dan Buku yang digunakan dalam	
Administrasi Kependudukan	
Jaminan Pelayanan	Peralatan/perlengkapan
1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);	1. ATK
2. Adanya Kode Etik Pegawai;	2. Komputer
3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.	3. Printer
•	4. Kertas A4 80 gram
	5. Server
	6. Jaringan Internet
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan	Apabila dokumen pelayanan kolektif sudah jadi namun belum diambil,
pelayanan;	akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. Jika
pelayanan,	
pelayanan,	dalam waktu 14 hari belum juga diambil, maka petugas akan
pelayanan,	dalam waktu 14 hari belum juga diambil, maka petugas akan menghubungi pemohon (aparat pekon) melalui telepon, email ataupun

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(13) SOP PELAYANAN BUNDA DEWI HARUM (13.2) SOP PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PRR BUNDA DEWI HARUM

				Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Pemohon/ Masyaraka Oprato		Petugas Pemilah Kas Berkas		Petugas POS	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Masyarakat melakukan perekaman di kecamatan terdekat atua perekaman Pelayanan Keliling yang perekaman dilakukan dibawah	mulai					1. Melakukan perekaman KTP-El 2. Namun KTP-El belum tercetak (PRR)		Berkas Pengajuan	
2	Setelah Perekaman dan Genap ber usia 17 tahun Secara langsung dilakukan Pencetakan KTP-el oleh operator Tanpa mengajukan Permohonan Pencetakan								File berkas Pengajuan	
3	Petugas Memilah berkas per Kecamatan dan menghitung jumlah berkas untuk laporan,			>				5 hari	Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik	
4	Dokumen diserahkan kepada kasi di bidang Inovasi untuk dibuatkan Berita Acara Pengiriman Dokumen Ke Petugas POS								Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik	
5	Berita Acara akan dikirim bersama dengan Dokumen yang sudah Jadi ke Petugas POS untuk diserahkan Ke Pemilik KTP								Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan BA	
6	Petugas POS Mengirim Dokumen yang sudah Jadi Kepada Pemilik KTP sesuai dengan alamat yang tertera di KTP								Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan BA	



PEMERINTAH DAERAH KAKABUPATEN TANGGAMUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

2. Adanya Kode Etik Pegawai;

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Nomor SOP	
Tanggal Pembua	tan
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	BUPATI TANG(
	(28)m
	DEWI HAND!
Judul SOP	PELAYANAN BUNDA DE'

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduka	
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun2013;	2. Mampu bersikap sopan, ramah dan kom
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;	3. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undan	g-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana t	elah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;	
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Replub	lik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman StandarPelayanan;	
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018Tentang Persyaratan dan Tata Ca	ara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
6 Permendagri No. 102 Th 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfa	atan Data
Kependudukan	
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksan	
Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaf	ftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;	
8 Permendagri No. 109 Th 2019 Tantang Formulir dan Buku yang digunakar	dalam
Administrasi Kependudukan	
Jaminan Pelayanan	Peralatan/perlengkapan

Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program ke Apabila dokumen pelayanan kolektif sudah

ATK

5. Server

Komputer
Printer

Blanko KTP

6. Jaringan Internet

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pela

belum diambil, akan disimpan terlebih dah pemohon mengambilnya. Jika dalam waktu